

**FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI
KERAJINAN ROTAN DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2012-2015**

**Oleh : Berlin Oktaviani Yohandes
(Berlinoktaviani@gmail.com)
Pembimbing : Dra. Wan Asrida, M.Si**

*Library of Riau University
Department of Government Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau
Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277*

Abstract

The development of rattan craft is growing rapidly in Pekanbaru City with the result of the works in the form of various forms of interesting creations so much to the outside of Pekanbaru, even already exported to neighboring countries namely Malaysia and Singapore, but according to the Office of Industry and Trade Pekanbaru City since 2009 until 2015 Rattan Craft Industry in Pekanbaru City only amounted to 11 industries. The data explains that Formal Rattan Industry has not improved since 2009. The purpose of this research is to know the function of local government in empowering rattan handicraft industry in Pekanbaru City year 2012-2015 and to know the factors that hamper the function of local government in empowering rattan craft industry in Pekanbaru City in 2012-2015.

The research method used is survey research. The location of this research is in Pekanbaru City which is the capital of Riau Province. Pekanbaru City currently has a rapid development in the field of rattan crafts with the work of various forms of creation that attracted so much to the outside of Pekanbaru.

The results of research on the function of local government in empowering rattan handicraft industry in Pekanbaru City in 2012-2015, on enabling indicators of Riau Provincial Government has built central rattan and continue to promote rattan craft industry in Pekanbaru city in various activities such as at certain events. There is no investor interest in Rattan Craft Industry in Pekanbaru City. In empowering indicators of Riau Provincial Government to strengthen the provision of misplaced facilities KUR (People's Business Credit) but hindered on loan guarantees. In Protecting indicators Local Government of Riau Province has not been able to overcome the problem of rattan raw material scarcity for rattan craft industry in Pekanbaru City.

Keywords: Functions of Government, Empowerment, Department of Industry and Trade Pekanbaru City.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika ekonomi kerakyatan telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing tinggi¹. Salah satu sektor pembangunan ekonomi kerakyatan yang memegang peranan penting dan strategis adalah pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai salah satu pilar penggerak roda perekonomian. Kementerian Perindustrian termasuk yang paling gencar menginstruksikan pemerintah daerah agar terus mengembangkan IKM². Sementara itu, Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Pekanbaru stagnan.

Kota Pekanbaru memiliki Industri Kreatif Khas Masyarakat yang tumbuh dengan adanya pemusatan geografis ditandai dengan banyaknya Industri Kerajinan rotan yang ada di kota ini yang salah satunya adalah Sentra Industri Kerajinan Rotan yang berada di kawasan jalan Yos Sudarso di Kecamatan Rumbai yang memiliki nilai jual tinggi. Sementara saat ini, pemerintah daerah tampaknya mulai memberikan perhatian kepada perkembangan Industri Rotan dengan merealisasikan wacana pembangunan gedung sentra industri rotan di kawasan Yos Sudarso Rumbai.

Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Pekanbaru stagnan. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru tahun 2013, jumlah IKM hanya bertambah tiga persen dari tahun 2012. Sementara Untuk

perkembangan Industri Rotan di Kota Pekanbaru mengalami penurunan jumlah pengusaharotan, seperti data yang dimiliki oleh Asosiasi Pengusaha Rotan Pekanbaru yang ditunjukkan pada tabel berikut³ :

Tabel I.2

Data Jumlah Pengusaha Rotan Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah Pengusaha
1	2012	35
2	2013	30
3	2014	30
4	2015	29

Sumber : *Asosiasi Pengusaha Rotan Pekanbaru, Tahun 2015*

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Jumlah Pengusaha Rotan Kota Pekanbaru mengalami penurunan pada tahun 2012 – 2015. Data ini menggambarkan pengusaha rotan Kota Pekanbaru, tidak melanjutkan usahanya. Bahkan menurut informasi yang penulis peroleh dari pengusaha rotan yang lain mengatakan mereka para pengusaha rotan baik yang memiliki izin ataupun tidak mengalihkan profesi mereka ke usaha lain. Kemudian menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan hingga tahun 2015 hanya berjumlah 11 industri (*Lampiran 1*). Data tersebut menjelaskan bahwa Industri Rotan Formal tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2009.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijumpai, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri**

¹ Direktorat Jendral Industri kecil dan Menengah , Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyuluhan Industri Kecil Menengah oleh Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan menengah , Departemen Perindustrian RI ,Jakarta : 2009 , Halaman 1.

²Pertumbuhan Industri Kecil Lamban , diakses dari : <http://m.riapos.co/38956-berita-pertumbuhan->

industri-kecil-lamban.html#.Uuby9dL-LMw ,7 Desember 2013

³Pengusaha Rotan di Riau Berguguran , diakses dari : <http://m.bisnis.com/industri/read/20131205/87/190730/pengusaha-rotan-di-Riau-berguguran> , : 05 Desember 2013

Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2015”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari gejala dan asumsi tersebut di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Fungsi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2015 ?
2. Apakah faktor – faktor yang menghambat fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri kerajinan rotan di Kota Pekanbaru tahun 2012-2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri kerajinan rotan di Kota Pekanbaru tahun 2012-2015.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri kerajinan rotan di Kota Pekanbaru tahun 2012-2015.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik
 - a. Sebagai bahan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan berguna sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya.
 - b. Memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan Ilmu khususnya terkait dengan upaya pemerintah dalam bentuk kebijakan pemerintahan.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi almamater sebagai rasa terima kasih yang tidak ternilai.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah melalui instansi terkait

dalam melakukan pengendalian terkait hal pelaksanaan.

- b. Khusus bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan dan pola pikir serta menerapkan berbagai kajian teoritis yang didapat dibangku perkuliahan, kedalam bentuk penelitian lapangan.

1.4 Konsep Teoritis

1.4.1 Fungsi Pemerintahan

Menurut Ryaas Rasyid (2000:59) dalam Muhadam Labolo⁴ membagi fungsi pemerintah menjadi 4 bagian, yaitu :

1. Pelayanan (*Public Service*).
2. Pembangunan (*Development*)
3. Pemberdayaan (*Empowerment*)
4. Pengaturan (*Regulation*)

Setiap fungsi pemerintahan diatas, memiliki pengertiannya sendiri. Pelayanan dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik⁵. Ada pemberdayaan dalam arti *empowering*, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya (bersifat politik). Sementara pemberdayaan dalam arti *Enabling*, yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity* dan *capability* masyarakat untuk melakukan sesuatu dengan menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional. Pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat

Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan

⁴ Labolo, Muhadam.2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 22

- 34
⁵ Ibid

kemakmuran dalam masyarakat. Oleh karena itu, seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, serta kerteabatan yang dimiliki pemerintah, maka secara perlahan masyarakat dituntut secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

1.4.1 Pemberdayaan

Sumodiningra⁶ bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu:

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*);
2. Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*);
3. Memberikan perlindungan (*Protecting*).

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hakikat dari kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada.

1.5.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru saat ini telah lama memiliki perkembangan di bidang kerajinan rotan dengan hasil karya berbagai bentuk kreasi yang menarik sehingga banyak digemari hingga ke luar Pekanbaru.

1.5.3 Jenis Data

1.5.3.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari *indepth interview* yang dilakukan. Berfokus pada besarnya Kontribusi Tim Sukses Suparman Sukiman dalam memenangkan pasangan Suparman Sukiman dalam Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.

1.5.3.2 Data sekunder

Ulber Silalahi (2010:291) Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Data yang diperoleh dari Dokumen, buku-buku, Jurnal, dan laporan-laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dianggap layak dan terkait dengan fungsi pemerintah dalam pemberdayaan industri kerajinan rotan di Kota Pekanbaru tahun 2012 - 2015

1.5.4 Sumber Data

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami obyek serta situasi sosial yang diteliti. Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan dalam penelitian.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁶ Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial*.

(Yogyakarta, Ghalia Indonesia), h 133-134.

1. *Indepth Interview*, wawancara yang dilakukan oleh dua pihak.
2. Emzir (2012:36) Observasi partisipatif, observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah observasi dimana peneliti terjun langsung ke lapangan.
3. Widodo (2012:61) Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dari pelaksanaan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2015 dan *indept-interview* dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. Pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil dari reduksi tersebut dikelompokkan dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan.

PEMBAHASAN

3.1 Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dijelaskan sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Industri kerajinan rotan merupakan salah satu industri kecil yang berkembang di

Provinsi Riau. Industri kerajinan rotan banyak dijumpai di Provinsi Riau, khususnya di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Secara spontan sentra industri tersebut membentuk kelompok-kelompok yang berkembang di daerah Jl. Yos Sudarso Kota Pekanbaru. Industri ini merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat dan mampu menyerap sejumlah tenaga kerja pada wilayah tersebut.

3.1.1 Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru Tahun 2012

Fungsi pemerintah sebagai salah satu prasyarat keberhasilan dalam pengembangan UMKM dengan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Adapun langkah-langkah strategis tersebut yaitu menciptakan iklim yang memungkinkan potensi industri kerajinan rotan di kota Pekanbaru akan berkembang (*Enabling*) yaitu membentuk pasar khusus untuk penjualan industri kerajinan rotan di Pekanbaru. Secara tidak langsung Pemerintah Daerah ikut juga membantu pembentukan pasar atau penjualan khusus industri kerajinan rotan di Kota Pekanbaru, berikut hasil wawancara penulis dengan informan :

“..memang benar Pemerintah secara tidak langsung ikut terlibat dalam kegiatan perkembangan UMKM salah satunya Industri kerajinan rotan di Pekanbaru dan untuk tempat khusus usaha ini sudah pernah dalam perencanaan sejak beberapa tahun silam bekerjasama dengan pemerintah provinsi riau. Sebelumnya para penjual sekaligus pengrajin rotan telah ada di sepanjang Jln. Yos Sudarso. Usaha mereka kebanyakan berupa mebel rotan dengan berbagai kreasi sejak tahun 70an sampai sekarang. Namun Pemerintah sudah merencanakan adanya pusat kerajinan di jalan tersebut

dengan berbagai fasilitas lainnya”(Wawancara dengan Bapak Baikals sebagai Kepala Bidang Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2016)

Kemudian Edi Edra sebagai Kepala Seksi Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, menanggapi pernyataan tersebut:

“memang benar apa yang disampaikan Bapak Baikals, bahwa sepanjang jalan Yos Sudarso selama ini telah terbangunnya pusat untuk industri kerajinan rotan dengan sendirinya, hanya saja kepastian tentang Pembangunan Pusat sentra kerajinan rotan secara utuh belum bisa terlaksana karena rencana tersebut bekerja sama dengan pemerintah provinsi.” (Wawancara, tanggal 11 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2012 direncanakan akan membangun sentral rotan, di Jalan Yos Sudarso, Rumbai sebagai tempat industri kerajinan rotan di Kota Pekanbaru dan akan dibuka tempat khusus pelatihan kerajinan rotan dengan anggaran yang akan di keluarkan dana sekitar Rp 6,5 milyar. Hanya saja hal itu tersebut masih berupa wacana yang belum tahu kapan realisasinya. Berikut hasil wawancara penulis dengan informan tentang rencana pemerintah pada tahun tersebut tersebut:

“..menurut saya itu hanya alasan pemerintah, untuk memberi harapan bagi pengusaha industri kerajinan rotan” (Wawancara dengan Sugianto sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Kota Pekanbaru, tanggal 14 Juli 2016)

Para pengusaha kerajinan industri rotan di Pekanbaru rata-rata termasuk para pengusaha yang tidak dapat memastikan seberapa banyak mereka dapat menjual produknya karena keuntungan penjualan diperoleh berdasarkan pemesanan yang

dilakukan konsumen secara langsung. Dapat dikatakan mereka pengusaha kerajinan industri rotan di Pekanbaru tidak memiliki modal tetap. Maka perlunya para insvestor yang akan mengembangkan usaha mereka, untuk mengetahui sejauhmana fungsi Pemerintah Daerah dalam mendatangkan para insvestor ini, dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan berikut:

“..Pemerintah Daerah terus mengusahakan para investor yang tertarik dengan usaha kerajinan industri rotan, namun tidak banyak investor yang tertarik dengan usaha ini salah satu alasannya jaminan keuntungan yang tidak pasti”(Wawancara dengan Bapak Hardiwan sebagai Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2016)

Kemudian menurut Bapak Edi Edra sebagai Kepala Seksi Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, menanggapi pernyataan tersebut:

“..para investor merasa modal yang mereka tanam pada usaha ini tidak akan mendapat jaminan keuntungan, karena melihat kebanyakan para pengusaha tidak memiliki pengurusan ijin usaha yang tidak lengkap, salah satunya pembayaran pajak usaha yang tidak lancar atau bahkan ada yang menunggak dan banyak lagi” (Wawancara tanggal 11 Juli 2016)

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa. Kegiatan promosi bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pemasaran. Pada pernyataan berikut dapat diketahui jawaban informan tentang kegiatan promosi yang dilakukan

Pemerintah Daerah pada industri kerajinan rotan di kota Pekanbaru:

“..belum ada informasi yang kami peroleh tentang kegiatan promosi industri kerajinan oleh Pemerintah Daerah, walaupun ada tentu ada surat tembusannya ke kami” (Wawancara dengan Ibu Neng Yusmasari sebagai Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Riau, tanggal 14 Juli 2016)

Begitu menurut Bapak Sugianto sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Kota Pekanbaru, menyatakan:

“belum ada informasi yang kami terima terkait dengan kegiatan promosi industri kerajinan kota Pekanbaru ke daerah-daerah lain minimal promosi dalam daerah sendiri pun tidak ada. walaupun ada, mungkin sangat jarang” (Wawancara, tanggal 14 Juli 2015)

3.1.2 Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru Tahun 2013

Sesuai Pasal 16 ayat 1 dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan peran pemerintah antara lain bersama Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi. berikut hasil wawancara penulis dengan informan:

“..Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan merelokasi pengrajin rotan yang banyak berjualan di pinggir jalan Yos Sudarso. Saat ini, Pemko sudah mempersiapkan lokasi khusus diatas lahan seluas 3 hektare bagi para pengrajin tersebut. Sejak tahun 2012 sudah direncanakan pembuatan Pasar Rotan yang masih di kawasan Rumbai. Nantinya, pengrajin akan ditempatkan di satu kawasan yang saat ini sedang di tata. Kawasan seluas 3 hektare itu milik Pemko. Saat ini sedang dilakukan

pematangan lahan untuk dibangun sentra pengrajin rotan. Pembangunan sentra pengrajin rotan ini anggarannya sharing dengan pemerintah provinsi...” (Wawancara dengan Baikal sebagai Kepala Bidang Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2016)

Kemudian Edi Edra sebagai Kepala Seksi Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, menanggapi pernyataan tersebut:

“awal perencanaan pembentukan pasar khusus sentral rotan bagi usaha kerajinan rotan di kota Pekanbaru, sudah dimulai sejak tahun 2012 ..” (Wawancara, tanggal 11 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2013 sudah memulai tahap pembangunan sentral rotan dan akan dibuka tempat khusus pelatihan kerajinan rotan. Perlunya para insvestor yang akan mengembangkan usaha IKM Rotan di Kota Pekanbaru, dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan berikut:

“..Pemerintah Daerah akan terus berusaha agar para investor tertarik dengan usaha kerajinan industri rotan, kita lihat aja dulu perkembangannya...” (Wawancara dengan Bapak Hardiwan sebagai Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2016)

Kemudian menurut Bapak Edi Edra sebagai Kepala Seksi Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, menanggapi pernyataan tersebut:

“..yang rumit adalah mendatang investor, karena mereka kebanyakan hanya mencari keuntungan, beda dengan insvestor yang sambil membangun....” (Wawancara tanggal 11 Juli 2016)

Kemudian menurut Ibu Neng Yusmasari sebagai Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Riau, menyatakan:

“..kebanyakan para insvestor hanya melihat apakah usaha tersebut diminati oleh pelanggan atau tidak, apalagi penjualan bahan baku rotan mendapat saingan dengan bahan plastik karena lebih murah dan tahan lama ” (Wawancara tanggal 14 Juli 2016)

Serta Bapak Sugianto sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Kota Pekanbaru, menyatakan:

“memang benar, penjualan kerajinan rotan mendapat saingan dengan bahan baku lainnya salah satunya bahan plastik, karena lebih murah, hanya saja hasil kerajinan dari rotan lebih bernilai tinggi dan alami” (Wawancara tanggal 14 Juli 2016)

Kemudian untuk mengetahui fungsi Pemerintah Daerah dalam mempromosi industri kerajinan rotan di kota Pekanbaru tahun 2013:

”..sama seperti tahun sebelumnya, kami terus menunggu informasi kegiatan promosi dari Pemerintah Daerah..” (Wawancara dengan Ibu Neng Yusmasari sebagai Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Riau, tanggal 14 Juli 2016)

Peran Pemerintah Daerah dalam mendorong potensi Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru yang telah dilakukan yaitu dengan menyediakan dan ikut serta dalam bidang produksi dan pengolahan merupakan salah satu fungsi Pemerintah dalam pemberdayaan UKM termasuk IKM Kerajinan Rotan di Pekanbaru. Namun realita yang terjadi tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang, dari hal tersebut penulis mencari tahu apa penyebabnya. Berikut hasil wawancara penulis dengan informan:

“..pengadaan bahan baku industri kerajinan Rotan telah diatur dalam

Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 tahun 2011 tentang Larangan Ekspor Rotan Mentah, sehingga bahan baku rotan dapat bermanfaat bagi industri kerajinan lokal termasuk salah satunya di Kota Pekanbaru” (Wawancara dengan Bapak Edi Edra sebagai Kepala Seksi Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2016)

3.1.3 Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru Tahun 2014

Potensi industri kerajinan rotan di kota Pekanbaru akan berkembang (*Enabling*) salah satunya membentuk pasar khusus untuk penjualan industri kerajinan rotan di Pekanbaru. Berikut hasil wawancara penulis dengan informan :

“..Tahun 2014 pengrajin rotan yang ada di Pekanbaru akan menempati lokasi berdagang baru yang representatif. Pembangunan gedung sentra rotan berlantai 5 di Jalan Yos Sudarso kini sudah hampir rampung”(Wawancara dengan Baikal sebagai Kepala Bidang Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2016)

Setiap tahun permasalahan yang terjadi pada industri kerajinan rotan di Kota Pekanbaru terbatasnya modal yang mereka miliki, sehingga perlunya para insvestor yang akan mengembangkan usaha IKM Rotan di Kota Pekanbaru, dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan berikut:

“..menurut kami belum ada investor yang tertarik dengan kerajinan rotan di Pekanbaru, karena setiap tahun proposal Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru yang kami tawarkan ke Pemerintah Pusat selalu di tolak...”(Wawancara dengan Bapak Hardiwan sebagai Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,

kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2016)

Kemudian untuk mengetahui fungsi Pemerintah Daerah dalam mempromosi industri kerajinan rotan di kota Pekanbaru tahun 2013:

"..sama seperti tahun sebelumnya, kami terus menunggu informasi kegiatan promosi dari Pemerintah Daerah.." (Wawancara dengan Ibu Neng Yusmasari sebagai Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Riau, tanggal 14 Juli 2016)

Kemudian untuk melihat peran Pemerintah Daerah melalui potensi Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru, salah satunya dengan menyediakan dan ikut serta dalam bidang produksi dan pengolahan merupakan salah satu fungsi Pemerintah dalam pemberdayaan UKM termasuk IKM Kerajinan Rotan di Pekanbaru. Industri rumahan kerajinan rotan yang berada di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Rumbai, sejak dulu sudah menjadi ciri khas kota Pekanbaru. Namun, akhir-akhir ini, pengusaha industri kerajinan rotan semakin melemah dan memudar. Berikut hasil wawancara penulis dengan informan:

"..Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 tahun 2011 tentang Larangan Ekspor Rotan Mentah diberlakukan guna mengantisipasi kelangkaan bahan baku rotan, namun ekspor produk rotan secara ilegal terus terjadi.." (Wawancara dengan Bapak Edi Edra sebagai Kepala Seksi Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2016)

Menanggapi pernyataan yang disampaikan Bapak Edi, Ibu Neng Yusmasari sebagai Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Riau, menyatakan:

"..menurut kami Pemerintah Daerah tidak serius mengawasi pengiriman produk bahan baku rotan, buktinya

mereka para oknum selalu berhasil mengekspor bahan baku rotan secara ilegal.." (Wawancara tanggal 14 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan fungsi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan industri kerajinan rotan terutama dalam memfasilitasi pengembangan usaha salah satunya penyediaan bahan baku yang diamanatkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 tahun 2011 tentang Larangan Ekspor Rotan Mentah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih juga terjadi kelangkaan bahan baku rotan.

Peran Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan UKM ini dari penyediaan fasilitas salah bantuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan lain sebagainya. Namun hal itu tidak terdapat pada IKM Kerajinan Rotan di Pekanbaru. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan yang disampaikan informan melalui wawancara penulis, yaitu:

"...setiap tahun kami mengusahakan para pengusaha Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru, namun mereka belum juga bisa memenuhi salah syarat pinjaman yaitu jaminan" (Wawancara, dengan Bapak Ilham Akbar sebagai Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2016)

Kemudian Bapak Sugianto sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Kota Pekanbaru, menanggapi pernyataan tersebut:

"Jumlah pengusaha rotan di Kota Pekanbaru setiap tahun mengalami penurunan akibat kurangnya dukungan promosi dan akses terhadap modal kerja...." (Wawancara, tanggal 14 Juli 2016)

Berdasarkan uraian tersebut berbagai bentuk perlindungan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan IKM Rotan di Kota

Pekanbaru dalam bentuk pinjaman belum terlaksana, serta penyediaan bahan baku masih belum terlaksana hal ini terbukti masih tingginya harga bahan baku rotan dan langka, hal ini dapat diketahui dari pernyataan yang disampaikan informan melalui wawancara penulis, yaitu:

“...permasalahan ekspor bahan baku rotan secara ilegal ini yang sulit diatasi, dan ini perlu evaluasi oleh Pemerintah..” (Wawancara, dengan Bapak Ilham Akbar sebagai Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang penulis peroleh peran Pemerintah Daerah pada fungsi memberikan perlindungan (*Protecting*) kepada IKM Rotan di Pekanbaru salah satunya memberikan bantuan pinjaman usaha yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum juga terealisasi karena permasalahan jaminan pinjaman, dan lagi penyediaan bahan baku masih belum terlaksana hal ini terbukti masih tingginya harga bahan baku rotan dan langka.

3.1.4 Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru Tahun 2015

Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi industri kerajinan rotan di kota Pekanbaru pada tahun 2015 menjadi lebih baik pada tahun-tahun sebelumnya, berikut hasil wawancara penulis dengan informan :

“..pembangunan gedung sentral rotan sebagai usaha kerajinan rotan pada tahun 2015 akan dikatakan rampung 80-90%, tinggal melengkapi fasilitas lainnya, akan tetapi meskipun gedung telah dibangun, namun ada beberapa kendala yang menghalangi kejelasan mengenai penggunaan gedung...” (Wawancara dengan Baikal sebagai Kepala Bidang Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal

11 Juli 2016)

Kemudian Edi Edra sebagai Kepala Seksi Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, menanggapi pernyataan tersebut:

“..Pada tahun 2014 memang akan digulirkan dana sebesar 6,7 M untuk membantu IKM. Pemprov melalui dinas terkait sebenarnya telah berkomitmen untuk mewujudkan rencana pembangunan fasilitas melalui dana tersebut salah satunya adalah pembangunan Sentra Industri kerajinan rotan. Namun terbitnya peraturan Gubernur telah menghalangi bantuan tersebut untuk selanjutnya di berikan kepada Dinas Perindustrian kota Pekanbaru, sehingga gedung yang dibangun di biarkan terbengkalai saja..” (Wawancara, tanggal 11 Juli 2016)

Pembangunan Gedung sentra kerajinan rotan nyatanya mengalami kendala karena terbitnya Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 tahun 2015 tentang pedoman Belanja bantuan Keuangan kepada Kabupaten / Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provisi Riau yang menghalangi komitmen Dinas Perindustrian sebelumnya. Peraturan Gubernur tersebut menjadi penghalang bagi Dinas berwenang untuk menyerahkan gedung tersebut kepada Dinas Perindustrian Kota Pekanbaru untuk dikelola. Hal ini karena Peraturan gubernur tersebut mengatur bahwa pemberian bantuan harus dalam bentuk Uang. Berikut hasil wawancara penulis dengan informan tentang keengganan para pengusaha IKM Rotan terutama yang berada di sepanjang jalan Yos Sudarso Pekanbaru untuk menempati gedung tersebut tersebut:

“..Bagi pelaku IKM Rotan sendiri, keberadaan Gedung Sentra kerajinan rotan memiliki pro Kontra tersendiri. Sebagian khawatir jika mereka pindah

usahanya ke gedung Sentral Kerajinan Rotan tersebut, pelanggan mereka tidak akan datang atau mereka para pelanggan akan beranggapan jika pindah ke gedung baru tentunya harga penjualan menjadi naik, dengan harga yang sekarang mereka selalu menawar murah...” (Wawancara dengan Sugianto sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Kota Pekanbaru, tanggal 14 Juli 2016)

Aspek lainnya yang menjadi perhatian adalah perlunya para investor yang akan mengembangkan usaha IKM Rotan di Kota Pekanbaru, dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan berikut:

“..sama seperti tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Daerah akan terus berusaha agar para investor tertarik dengan usaha kerajinan industri rotan. Namun diperlukan Manajemen Skala besar dalam pengembangan Industri kerajinan IKM untuk menarik perhatian Investor. ...”(Wawancara dengan Bapak Hardiwan sebagai Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2016)

Kemudian menurut Ibu Neng Yusmasari sebagai Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Riau, menyatakan:

“..saya heran, apakah benar belum ada investor yang tertarik dengan usaha kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru. Padahal rasanya minat terhadap rotan terbilang cukup” (Wawancara tanggal 14 Juli 2016)

Kemudian untuk mengetahui fungsi Pemerintah Daerah dalam mempromosi industri kerajinan rotan di kota Pekanbaru tahun 2015:

“..sama seperti tahun sebelumnya, kami terus berusaha membantu untuk terlibat dalam pemasaran produk – produk

kerajinan melalui Event – event yang ada dengan mengajak beberapa pelaku Usaha tentunya, salah satunya pengusaha rotan pekanbaru..” (Wawancara dengan Ibu Neng Yusmasari sebagai Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Riau, tanggal 14 Juli 2016)

Peran Pemerintah Daerah berkaitan potensi Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru, salah satunya dengan menyediakan dan ikut serta dalam bidang produksi dan pengolahan merupakan salah satu fungsi Pemerintah dalam pemberdayaan UKM termasuk IKM Kerajinan Rotan di Pekanbaru Berikut hasil wawancara penulis dengan informan:

“..permasalahan bahan baku industri kerajinan Rotan yang di ekspor secara ilegal sampai saat ini belum membuahkan hasil, hal ini bukan kewenangan kami. Untuk mendukung Produksi rotan, kami sebenarnya telah menjalankan berbagai program di tahun sebelumnya seperti pemberian mesin produksi dan lain – lain. Berkaitan dengan produksi, dalam pengamatan kami selama ini , kendala penekanan biaya produksi bisa dilakukan jika pelaku usaha rotan membeli bahan baku dalam skala besar. Hanya saja pelaku IKM rotan selama ini membeli bahan baku rotan dalam bentuk satuan yang tentu saja, harga belinya cukup tinggi dibandingkan dengan harga beli bahan baku dalam skala besar” (Wawancara dengan Bapak Edi Edra sebagai Kepala Seksi Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2016)

Peran Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan UKM ini dari penyediaan fasilitas salah bantuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan lain sebagainya. Namun hal itu tidak terdapat pada IKM Kerajinan Rotan di Pekanbaru. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan yang disampaikan informan melalui wawancara penulis, yaitu:

“...setiap tahun kami mengusahakan para pengusaha Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru, namun mereka belum juga bisa memenuhi salah syarat pinjaman yaitu jaminan. Selain itu, syarat lainnya yang seharusnya dimiliki pelaku usaha untuk bisa mengembangkan usahanya adalah terus melakukan registrasi Izin usaha industri. Sebagian besar program bantuan dari pihak luar biasanya meminta Dokumen ini sebagai prasyarat untuk menggulirkan bantuan. Sayangnya, kesadaran pelaku usaha tidak begitu tinggi...” (Wawancara, dengan Bapak Ilham Akbar sebagai Kepala Seksi Pendaftaran dan Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 11 Juli 2016)

Kemudian Bapak Sugianto sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Kota Pekanbaru, menanggapi pernyataan tersebut:

“...sebenarnya untuk mendapatkan pinjaman tersebut pihak bank tidak akan menolak jika ada promosi oleh Pemerintah. Selain itu, terkait pengurusan izin usaha industri, bagi kami dinilai tidak terlalu penting” (Wawancara, tanggal 14 Juli 2016)

Berdasarkan uraian tersebut berbagai bentuk perlindungan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan IKM Rotan di Kota Pekanbaru dalam bentuk pinjaman belum terlaksana karena tidak adanya promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap usaha kerajinan rotan di kota Pekanbaru, serta penyediaan bahan baku masih belum terlaksana hal ini terbukti masih tingginya harga bahan baku rotan dan langka.

3.2 Faktor – Faktor yang Menghambat Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru tahun 2012-2015

3.2.1 Kebijakan Pemerintah

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 tahun 2011 tentang Larangan Ekspor Rotan Mentah pada akhir tahun 2011 potensi produksi rotan di Indonesia merosot hingga 30% dari tahun sebelumnya. Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan evaluasi setiap semester tentang berlakunya Permendag No.35 tahun 2011 tersebut, namun hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi tentang perkembangan dari pembentukan Badan Penyanggah Rotan yang direncanakan sebagai badan pemerintah yang berfungsi menampung hasil-hasil rotan mentah sebagai antisipasi tidak terserapnya rotan mentah oleh industri kerajinan dan meubel rotan di Indonesia pasca diberlakukannya larangan ekspor rotan mentah.

Pengrajin rotan juga kena dampaknya dari kebijakan tambal sulam itu (baca: Permendag No.35/2011-redKelahiran Permendag No.35 tahun 2011 seperti aturan-aturan sebelumnya, yaitu hanya berlaku sementara. Kelebihan pasok bahan baku rotan untuk industri dalam negeri adalah fenomena biasa ketika larangan ekspor rotan mentah diberlakukan. Kondisi kelebihan pasok ini seharusnya menjadi pertimbangan mendasar Pemerintah saat memberlakukan larangan ekspor. Percepatan daya serap industri rotan dan meubel dalam negeri tidak bisa mengimbangi produksi bahan baku rotan.

3.2.2 Kesulitan Akses Informasi Pemasaran

Masalah yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan IKM Kerajinan Rotan di Pekanbaru adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnnya informasi mengenai pasar tersebut,

menjadikan IKM Kerajinan Rotan di Pekanbaru tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi.

3.2.3 Keterbatasan Finansial

IKM Kerajinan Rotan di Pekanbaru menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang. Kemudian Edi Edra sebagai Kepala Seksi Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, memberikan pandangan sebagai tersebut:

“Masalah yang mengenai kurangnya modal memang terus terjadi dan dianggap sebagai penghalang dalam pengembangan usaha. Berbagai program pemerintah melalui dinas terkait lainnya seperti Dinas Koperasi dan UMKM yang menawarkan berbagai program kerjasama dalam menangani hal ini”.

3.2.4 Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

3.2.5 Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis,

banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah seperti industri kerajinan Rotan di Pekanbaru mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku.

3.2.6 Keterbatasan Teknologi

Berbeda dengan Negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya termasuk IKM Kerajinan Rotan di Pekanbaru masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

3.2.6 Kurang kuatnya Motivasi Jiwa Entrepreneur

Banyaknya alternatif pekerjaan yang dinilai lebih menjanjikan lebih kurang telah banyak mempengaruhi masyarakat untuk tidak tertarik membuka usaha sendiri atau mempertahankan usahanya karena dinilai tidak memiliki kepastian. Kuatnya Motivasi menumbuhkan Jiwa Entrepreneur tentu akan sangat membantu pengusaha untuk lebih produktif dan kreatif dalam meluaskan usahanya.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2015, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada indikator *enabling* yaitu menciptakan iklim yang memungkinkan

- potensi Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru terus berkembang. Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah membangun sentral rotan, di Jalan Yos Sudarso, Rumbai sebagai tempat industri kerajinan rotan di Kota Pekanbaru dan tempat khusus pelatihan kerajinan rotan, hal ini baru terwujud 80-90% di tahun 2015. Pemerintah Daerah Provinsi Riau terus mempromosi industri kerajinan rotan di kota Pekanbaru dalam berbagai kegiatan seperti pada event-event tertentu. Belum peminat investor terhadap Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru.
2. Pada indikator *empowering* yaitu menguatkan potensi dan daya yang dimiliki Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk menguatkan penyediaan fasilitas salah bantuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan lain sebagainya. Namun hal itu tidak terdapat pada IKM Kerajinan Rotan di Pekanbaru karena terhalang pada jaminan pinjaman.
 3. Pada indikator *Protecting* yaitu memberikan perlindungan Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 tahun 2011 tentang Larangan Ekspor Rotan Mentah pada akhir tahun 2011 potensi produksi rotan di Indonesia merosot hingga 30% dari tahun sebelumnya. Kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki tata niaga rotan dan mendorong daya serap industri kerajinan rotan dalam negeri tersebut ternyata semakin memperburuk kondisi perotanan di Indonesia, salah satunya pada Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru yaitu sulitnya mendapat bahan baku rotan.

4.2 Saran

Adapun saran atau masukan kepada beberapa pihak yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini:

1. Diperlukan tindakan perencanaan pengembangan ekonomi lokal secara terpadu dan berkelanjutan dari pihak pemerintah daerah dalam menguatkan kemampuan Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru.
2. Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor antar SKPD Kota Pekanbaru terkait menguatkan potensi dan daya yang dimiliki Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru.
3. Perlu adanya evaluasi dan penajaman berbagai penguatan potensi dan daya yang dimiliki Industri Kerajinan Rotan di Kota Pekanbaru yang telah dijalankan oleh pemerintah Daerah selama ini yakni program yang mampu mendorong kemandirian ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita Raharjo. 2011. *“Manajemen Pemerintah Daerah”*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Beddy Iriawan Maksudi. 2012. *Sistem politik indonesia : Pemahaman secara teoritik dan Empirik*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Budi Winarno. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Direktorat Jendral Industri kecil dan Menengah. 2009. *Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyuluhan Industri Kecil Menengah oleh Tenaga Peyuluh Lapangan Industri Kecil dan menengah*. Jakarta : Departemen Perindustrian RI.
- Harry Hikmat. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Husen, A. ,2005. *Strategi Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perekonomian Indonesia, Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- J.M Papasi. 2010. *Ilmu Politik : Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Graha ilmu ‘

- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.
- Mudrajat Kuncoro. 2007. *Ekonomika industri indonesia : Menuju Negara Industri Baru 2030?*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Musfirah Junaido 2006. *memberdayakan perusahaan daerah di Kab.Bone sulawesi selatan" dalam Membangun Indonesia dari Daerah* Yogyakarta: Percetakan Kanisius Media.
- M. Djadiono dkk. 2006. *Membangun Indonesia dari Daerah*. Yogyakarta: Percetakan Kanisius Media.
- Nugroho, Trilaksono. 2007. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang, FIA. Universitas Brawijaya.
- Prasojo, Eko. 2004. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik vol.IV no.2. Maret-Agustus:10-24.
- Silalahi Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit: Refika Aditama, Bandung.
- Soetrisno, Noer. 2005. *Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UKM Dalam Perekonoian Indonesia*. Sumbangsih untuk analisis struktural. STEKPI. Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Toni andrianus pito s.ip , efriza s.ip kemal fasyah s.ip. 2006 . *Mengenal teori - teori politik dari sistem polik sampai korupsi*. Bandung: Penerbit Nuansa
- Zulkarnain ,M.M. 2003. *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta : Penerbit Adicita Karya Nusa
- Miliar Promosi IKM , diakses dari : <http://Pekanbaru.tribunnews.com/2013/04/20/disperindag-Pekanbaru-alokasikan-rp25-miliar-promosi-ikm> , 20 April 2013
- Pemko Pekanbaru Bangun Sentra Kerajinan Rotan , diakses dari <http://fokusriau.com/berita-pemko-Pekanbaru-bangun-sentra-kerajinan-rotan.html> , 17 Juni 2012
- Pengusaha Rotan di Riau Berguguran , diakses dari : <http://m.bisnis.com/industri/read/20131205/87/190730/pengusaha-rotan-di-riau-berguguran> , : 05 Desember 2013
- Pertumbuhan Industri Kecil Lamban, diakses dari : <http://m.riaupos.co/38956-berita-pertumbuhan-industri-kecil-lamban.html#.Uuby9dL-LMw> , 7 Desember 2013
- Pertumbuhan Industri Kecil Lamban , diakses dari : <http://m.riaupos.co/38956-berita-pertumbuhan-industri-kecil-lamban.html#.Uuby9dL-LMw> , 7 Desember 2013.

Sumber Lain :

Disperindag Pekanbaru Alokasikan Rp.2,5